

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari otonomi daerah pada umumnya adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat yang beraneka ragam suku bangsa yang disatukan dalam sebuah bingkai Negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan salah satu upaya yang dapat dimanfaatkan dengan benar adalah dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain mengoptimalkan kemampuan, prakarsa, kreasi, inisiasi dan partisipasi aparat pemerintah daerah untuk membangun daerahnya masing-masing adalah hal utama dari pembangunan tersebut.

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengakomodir, mengelola, dan memberdayakan potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah sendiri terdapat perangkat pemerintah daerah yang dimulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Salah satu unsur penting dalam sistem pembangunan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan yang berpusat di desa dalam arti pembangunan

dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan pelaksana pembangunan “garis depan” dalam pemerintahan Indonesia sesuai dengan amanat Otonomi Daerah. Pembangunan desa merupakan usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan didukung dengan pembinaan secara terus menerus, sistematis dan terarah sebagai suatu kesatuan dengan pembangunan regional/daerah dan nasional, (Marbun, 2008: 38). Hal ini berarti pembangunan desa termasuk bagian penting dari pembangunan Nasional, serta memiliki peran dan fungsi yang juga sangat penting dalam tujuan pembangunan Nasional karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas pedesaan.

Daerah pedesaan merupakan daerah tempat persebaran kegiatan-kegiatan masyarakat, seperti kegiatan pertanian dan juga kegiatan industri-industri kecil. Dalam perkembangan sekarang ini, ekonomi Indonesia masih bertolak pada ekonomi pertanian dengan nilai potensil terbesar terletak di daerah pedesaan. Dengan berkembangnya kegiatan-kegiatan disektor industri, barulah terjadi pergeseran titik-berat nilai potensil kearah daerah perkotaan. Walaupun demikian, arah pembangunan daerah tidak dapat dikatakan berubah, dengan berpaling arah pembangunannya, hingga saat ini pembangunan di wilayah pedesaan merupakan penentu keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1).

Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintahan desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar-menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan. Tanpa adanya pemerintahan desa yang kuat, desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi objek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Dengan konsep yang telah dijelaskan tentang pembangunan desa di atas, dalam pembangunan desa tersebut desa dipimpin oleh kepala desa sebagai pemimpin tertinggi formal di sebuah desa dan dipandang mempunyai potensi peranan lebih untuk menguasai aktivitas-aktivitas di desa. Dengan adanya pemimpin dalam pemerintahan desa diharapkan nantinya dapat mengerakan pembangunan di desa menjadi lebih terarah. Sehubungan hal tersebut, Peranan kepala desa yang dipandang mempunyai potensi sangat penting untuk lebih menguasai desanya dan lebih aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan setiap kesempatan selalu menjelaskan

manfaat program pemerintah desa kepada masyarakat. Seorang pemimpin masyarakat harus aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk ikut mengelola kegiatan pemerintah desa, apabila masyarakat melihat bahwa tokoh pemimpin mereka aktif dan dekat dengan masyarakatnya, maka masyarakat pun akan tertarik untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Kepala desa pemimpin yang memiliki wewenang tertinggi di pemerintahan desa, tanpa adanya peranan kepala desa yang mampu menggerakkan dan memotivasi masyarakatnya, maka swadaya masyarakat yang diharapkan tentunya tidak dapat mendukung pembangunan desa. Jika dalam proses pelaksanaan pembangunan desa belum sesuai dengan yang diharapkan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sering menghadapi masalah-masalah yang mempengaruhi bahkan dapat menghambat pembangunan desa itu sendiri, dikarenakan masih rendahnya tingkat kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga belumlah sesuai dengan yang diharapkan dan belum sepenuhnya mendukung proses pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan demikian maka untuk menumbuhkan partisipasi dari masyarakat diperlukan adanya peranan pemimpin formal yang berfungsi mendorong dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif sebagai kekuatan dalam pembangunan desa. Kepala desa sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa, berfungsi sebagai administrator pemerintah, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. Dengan demikian kepala desa harus mampu berperan sebagai motivator, komunikator serta mampu membina organisasi kemasyarakatan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian perhatian utama harus diberikan pada upaya

peningkatan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Adisasmita, (2006: 35) mengenai partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program-program pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.

Tanpa partisipasi masyarakat pembangunan itu tidak berarti dan sudah tidak pasti akan mencapai sasaran yang dituju. Pembangunan tanpa dukungan atau partisipasi masyarakat adalah suatu usaha yang sia-sia karena tidak akan efektif. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan desa sangat dibutuhkan seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan desa yang memiliki kemampuan dan semangat yang dapat mengajak, mengayomi, dan memotivasi masyarakat untuk dapat bekerja sama demi pembangunan yang lebih baik.

Partisipasi seringkali diabaikan oleh masyarakat saat ini, disebabkan karena kurangnya peranan dari seorang pemimpin. Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan merupakan desa yang masih dalam tahap perkembangan dan kepala desa atau pemimpin pemerintah desanya harus berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar mendapatkan hasil yang optimal dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan di Desa Sajau Hilir, kepala desa dan masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan desa sesuai dengan yang diharapkan.

Kepla Desa Sajau Hilir sebagai kepala pemerintahan desa tentu sangat berharap sekali dukungan dari masyarakat Desa Sajau Hilir dalam merumuskan kebijakan, dan ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Melihat kondisi ril di lapangan, tentu banyak pembangunan yang harus dibangun oleh

pemerintah Desa Sajau Hilir untuk kesejahteraan masyarakat setempat, dan untuk mewujudkan itu, partisipasi masyarakat desa sangat diharapkan agar program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan target yang diinginkan pemerintah Desa.

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan?

C. Tujuan Penelitian

Sukardi (2004: 111), mengatakan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh suatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat timbul dimasyarakat. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebgaimana berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kepala desa bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa menyangkut peranan sebagai pemimpin formal di desa dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembangunan desa.
2. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti berikutnya yang memiliki topik yang sama.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, dala memperkaya khasanah ilmu sosial dan politik.
4. Manfaat praktis, untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pegetahuan penulis dalam konsep pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Teori

1. Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat”. Peranan (*role*) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (*status*) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Fadli dalam Kozier Barbara, 2008: 66).

Peran menurut Soerjono Soekanto, (2002: 243) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran yang bisa disebut juga dengan peranan (*role*) memiliki beberapa arti:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang

Levinson dalam Soekanto (2009: 213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-

peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut. (Soerjono Soekanto, 2002 : 247).

2. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya

sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa menurut Widjaja H.A.W. (2012 : 3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- 2) Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;
- 3) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;

- 4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- 5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- 6) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- 7) Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ” Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 23 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- 1) Kepastian hukum.
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Tertib kepentingan umum
- 4) Keterbukaan
- 5) Proporsionalitas
- 6) Profesionalitas

- 7) Akuntabilitas
- 8) Efektivitas dan efisiensi Kearifan lokal
- 9) Keberagaman
- 10) Partisipatif.

3. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari pendapat tersebut, kepala desa dianggap sebagai bapak atau tokoh masyarakat dalam membuat peraturan desa atau pun dalam mengambil suatu keputusan dimana dalam mencapai suatu kesepakatan yang sempurna kepala desa harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui badan permusyawaratan desa. Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa dan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah pembangunan yang dilakukan dalam wilayah yang dipimpinnya yaitu Desa, hal ini dapat dikatakan demikian, karena kepala desa yang memegang kendali perubahan dalam pembangunan desa, yang dimana kepala desa sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa pimpinan tertinggi dalam desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 3 mengatakan, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berdasarkan UU di atas juga dapat disimpulkan bahwa kepala desa sebagai pimpinan dan memiliki otoritas serta berhak memiliki perangkat pendukung terlaksananya pembangunan desa.

Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan/mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

4. Fungsi Kepala Desa

Simandjuntak (2000: 3) mengemukakan “Fungsi adalah besaran yang berhubungan atau besaran yang berubah”. Musanef (2004: 10) menjelaskan, “Yang dimaksud dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu”.

Selanjutnya, Siagian (2006: 155) mengemukakan, Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi adalah perincian dari tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen merupakan *derivation* dari pada fungsi-fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan.

Berbicara mengenai fungsi dari seorang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya ialah mengelola pemerintahan desa yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan, yaitu baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik dengan tugas yang dipercayakan itu. kepada desa tentunya dibantu oleh perangkat desa dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut A.W Widjaja (2006: 22) mengemukakan fungsi-fungsi Kepala Desa tersebut adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rumah tangganya sendiri.
- b. Mengerahkan partisipasi masyarakat.
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah diatasnya.

- d. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan perangkat desa lainnya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasilnya pun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain itu pembangunan Desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh segelintir masyarakat dan juga bagaimana penanan Kepala Desa menggerakannya, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan. Hal ini bisa terwujud atau terealisasi apabila seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan yang telah dicapai di dalam wilayahnya.

5. Peranan Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa

Adapun beberapa hal yang menjadi peranan Kepala Desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000: 42) yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai Motivator

Motivator yaitu Fungsi Pemerintah Desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

Menurut Mahayana (2013: 6) menyatakan peran pemimpin sebagai motivator, yaitu peran sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

Karena Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan di desa, tanpa adanya peran Kepala Desa yang mampu menggerakkan dan memotivasi masyarakatnya, maka swadaya masyarakat yang diharapkan tentunya tidak dapat mendukung pembangunan desa. Swadaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sering menghadapi masalah-masalah yang mempengaruhi bahkan dapat menghambat pembangunan desa itu sendiri, dikarenakan masih rendahnya tingkat kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hingga belumlah sesuai dengan yang diharapkan dan belum sepenuhnya mendukung proses pelaksanaan pembangunan desa. Agar swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dapat ditingkatkan dan dapat mendukung serta memperlancar pembangunan, maka perlu adanya suatu Peran Kepala Desa yang mampu menggerakkan dan memotivasi masyarakatnya. Dengan berperannya Kepala Desa yang dapat menggerakkan masyarakat agar turut serta dalam pembangunan, maka pembangunan desa dapat dilaksanakan secara

terarah dan terpadu untuk kepentingan kehidupan masyarakat desa demi terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur (Anggi Setiawan, 2013: 2).

b. Sebagai Fasilitator

Fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Masyarakat sangat terbatu dengan fasilitas yang disediakan oleh kepala desa dalam rangka pelaksanaan serta meningkatkan pembangunan desa. Fasilitas digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan hasil dari pembangunan dapat digunakan oleh masyarakat dalam menunjang pembangunan secara non fisik. Fasilitas yang digunakan oleh masyarakat tentu merupakan fasilitas yang disediakan kepala desa dalam mewujudkan pembangunan.

Menurut Mahayana (2013: 8) menyatakan peran Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa berjalan baik.

Kepala Desa memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan desa pemerintah desa atau Kepala Desa memberikan bantuan kepada masyarakat desa misalnya, tugas fasilitator disini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat desa misalnya, Kepala Desa meminjamkan alat-alat untuk kegiatan pembangunan fisik seperti perbaikan jembatan dan perbaikan parit

maupun perbaikan jalan serta membantu setiap kegiatan masyarakat dengan beberapa cara sesuai ketentuan-ketentuan yang ada, misalnya dengan memberikan fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan pelatihan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kelompok tani/nelayan dan masyarakat lainnya yang bertujuan sebagai perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing dalam pembangunan desa.

Kepala Desa fasilitator adalah memberikan fasilitas bantuan, kemudahan dan kelancaran dalam pembangunan atau kegiatan-kegiatan desa. Serta narasumber yang baik atau dapat disebut dengan koordinator permasalahan masyarakat desa dalam program pemberdayaan di desa. Sebagai fasilitator tentu masyarakat sangat mengharapkan fasilitas yang memadai dalam rangka pembangunan desa.

c. Sebagai Mobilisator

Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

d. Kepala Desa Sebagai Mediator

Pengertian mediasi lebih konkret ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah

pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5).

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain ketika para pihak tidak lagi memiliki alternative penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. (Satria Eka Tri Laksana. blogspot.com/2012).

6. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

a. Konsep Dasar Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang tinggi akan berpengaruh terhadap suatu program pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan segalanya oleh penyelenggara pembangunan, tetapi partisipasi masyarakat juga turut memberikan andil dalam tercapai atau tidaknya suatu program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Koentjaraningrat yang di kutip oleh Khairuddin (2005:148) pola partisipasi masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan dapat dibagi kedalam beberapa pola sebagaimana berikut ini :

1) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.

Perasaan terlibat dalam perencanaan pembangunan harus ditumbuhkan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan akan menumbuhkan kepercayaan kepada diri sendiri terhadap apa yang dibangun.

2) Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, terutama pada program fisik yang telah direncanakan bersama, tentu membutuhkan keterlibatan dari segenap masyarakat, karena walaupun rencana telah disusun dengan baik tanpa ada dukungan dalam pelaksanaannya, maka pembangunan itu juga tidak akan berjalan dengan baik.

3) Partisipasi dalam Memelihara dan Memanfaatkan Hasil Pembangunan.

Partisipasi masyarakat dapat tumbuh apabila mereka telah dapat menikmati atau memperoleh manfaat dari pembangunan yang dijalankan, maka dengan sendirinya tentu diperlukan usaha melaksanakan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Adisasmita, (2006: 38) Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Adisasmita mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan

sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:

- a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/serana, data, rencana, dan teknologi).
- b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan).
- c. Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, mempelancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan”pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.

Menurut Tjokromidjojo (dalam Safi’i, 2007: 104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, startegi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu

keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Slamet, 1992 dalam Sumardjo dan Saharudin, 2003: 87).

Ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor di seputar kehidupan manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, seperti psikologis individu (*needs*, harapan, motif, *reward*), pendidikan, adanya informasi, keterampilan, teknologi, kelembagaan yang mendukung, structural dan stratifikasi sosial, budaya lokal serta peraturan dan pelayanan pemerintah. Menurut Oppenheim (1973) dalam Sumardjo dan Saharudin (2003: 88) ada unsur yang mendukung untuk berperilaku tertentu pada diri seseorang (*Person inner determinants*) dan terdapat iklan atau lingkungan (*Environmental factors*) yang memungkinkan terjadinya perilaku tersebut.

Menurut Sahidu (2002: 54) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, *needs*, *rewards* dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki.

Tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar ikut serta dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Learning process*; Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- b. *Institutional development*; Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tampung dan daya dukung sosial.
- c. *Participatory*; Cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali need yang ada dalam masyarakat (Marzali, 2003:72 dalam Tuty Irawaty.wordpress.com/2009).

7. Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan

Sebelum ditelaah tentang pembangunan desa, maka terlebih dahulu dikemukakan arti serta pengertian dasar dari pembangunan pada umumnya, menurut Tjokroamidjojo (2000: 42) mengatakan bahwa pembangunan adalah didalam proses atau usaha-usaha perubahan sosial (*sicial chenge*) tersebut dapat berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik.

Dalam melaksanakan pembangunan perlu adanya suatu usaha dan proses, menurut Khairuddin (2000: 24) yang dinyatakan oleh Siagian pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Usaha atau proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu Negara adalah tekad atau

keinginan yang disusun berdasarkan pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan secara luas. Usaha atau proses pembangunan terlihat dengan adanya kehendak untuk menentukan arahan-arahan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Demi terwujudnya pembangunan yang berjalan dengan baik dalam suatu desa diperlukannya partisipasi dari masyarakat agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar, menurut Siagian (2005: 4) ada 7 (tujuh) ide pokok pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang tanpa akhir (*never ending*).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, jika dalam rangka kehidupan seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
3. Pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif

dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari suatu jangka ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi berbeda itu dapat diprekludisikan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada.

5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain cara hidup yang baru akan lebih dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan “cara hidup gaya barat”. Setiap bangsa negara yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-aspek tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan ditempuh.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunann per-*definisi* multidimensional. Artinya, modernitas mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat menjawab dalam bidang- bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.
7. Semua hal yang telah dibahas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia karena mampun menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya, pembangunan menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, pembangunan bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Melainkan pembangunan tergantung dari proses emasipasi diri, dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan.

b. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan ialah sebuah proses yang tidak pernah berhenti namun selalu bergerak secara berkelanjutan untuk menuju tahap yang lebih modern pendapat ini juga dikemukakan oleh Siagian, (2000: 4) menyatakan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai serangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation Building).

Adapun yang dimaksud dengan pembangunan desa, yaitu pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, mencakup dari segala bidang baik fisik, material maupun bidang spiritual terbentuk dalam satu kesatuan integritas usaha yang menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan memperhatikan ketentuan Nasional.

Menurut, Irawan dan M. Suparmoko (2002: 201) Pembangunan masyarakat Desa adalah suatu proses dimana orang-orang dalam desa, bersama-sama dengan pejabat-pejabat Pemerintahan berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan Bangsa dan Negara, Pembangunan masyarakat Desa meliputi

dua unsur, yaitu ikut serta penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik serta lain-lain bantuan sedemikian rupa sehingga memajukan inisiatif mereka sendiri dan saling membantu.

Senada pula disampaikan oleh Taliziduhu Ndraha, (2002: 9) bahwa Pembangunan Desa adalah proses dengan mana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat Desa ke dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional.

Sedangkan menurut R. Bintoro, (2003: 25) Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong. Dengan sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan desa dengan klasifikasi Desa swasembada yaitu Desa yang maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan dimana dalam pembangunan desa ini berani mewujudkan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pembukaan Undang Undang 1945 dalam hal ini yang dimaksud ialah pembangunan nasional yang adil dan merata. Mengingat

sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di pedesaan. Sehingga suatu kebijakan yang tepat takala pemerintah menjadikan pembangunan pedesaan baik mencakup pembangunan fisik maupun non fisik sebagai pusat pembangunan nasional karena membangun desa berarti menjauhkan sebagian besar rakyat Indonesia dari kemiskinan. Hal ini menjadi tugas utama dari pemerintah daerah khususnya pemerintah desa, dalam menyingkapi hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat desanya khususnya juga dalam menyusun program yang sekiranya tepat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kelompok Bidang Keahlian Manajemen Rekayasa Konstruksi ITB (2001): Infrastruktur (prasarana) adalah bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas. Sedangkan menurut Kodoatie (2003) infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Penulis dapat simpulkan bahwa Infrastruktur desa adalah bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang kegiatan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik/permasalahan yang akan diteliti. Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hendra Mondong. 2015. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Hasil penelitian sebagai

berikut: 1) peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bagi terlaksananya pembangunan sudah berperan dengan baik dalam rangka mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat. 2) Kemudian dilihat dari segi kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sudah mampu, sesuai dengan informasi yang ada. 3) Terdapat beberapa faktor penghambat, namun hal yang demikian masih dapat diantisipasi oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah kepala desa atau dengan sebutan lain hukum tua lewat motivasi yang disampaikan langsung serta selalu meningkatkan efektifitas kerja dan setiap aparat pemerintah.

2. Khayrul Fiker, Priyatno Harsasto, Rina Martini. 2013. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Secara prosedural dan petunjuk pelaksanaan, rencana kerja dan rencana pembangunan secara tertulis untuk Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum bagi level pemerintahan desa/kelurahan; 2) Langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Lodaya dengan memberikan kewenangan kepada Dusun untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing Dusun memberikan motivasi sendiri bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan yang akan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa; 3) Faktor penghambat , ini menyebabkan pembangunan di Desa Lodaya sedikit ketinggalan dari desa lain yang lokasinya tidak jauh dari pusat Kecamatan Randudongkal; 4)

Faktor pendukung merupakan aspek yang sangat mendukung untuk kemajuan desa terutama dari pembangunan. Hasil pengamatan selama penelitian dan masukan dari para informan baik dari perangkat pemerintahan desa maupun masyarakat yang dilibatkan di dalam penelitian ini menjadi tolok ukur inisiatif selanjutnya, antara lain dengan memberikan keleluasaan masyarakat Desa Lodaya untuk ikut serta secara lebih aktif dan nyata dengan memberikan independensi yang lebih leluasa kepada mereka untuk memberikan sumbangan kepada pembangunan desa. Kata kunci: Pembangunan, Partisipasi, Lodaya, Pembangunan Desa.

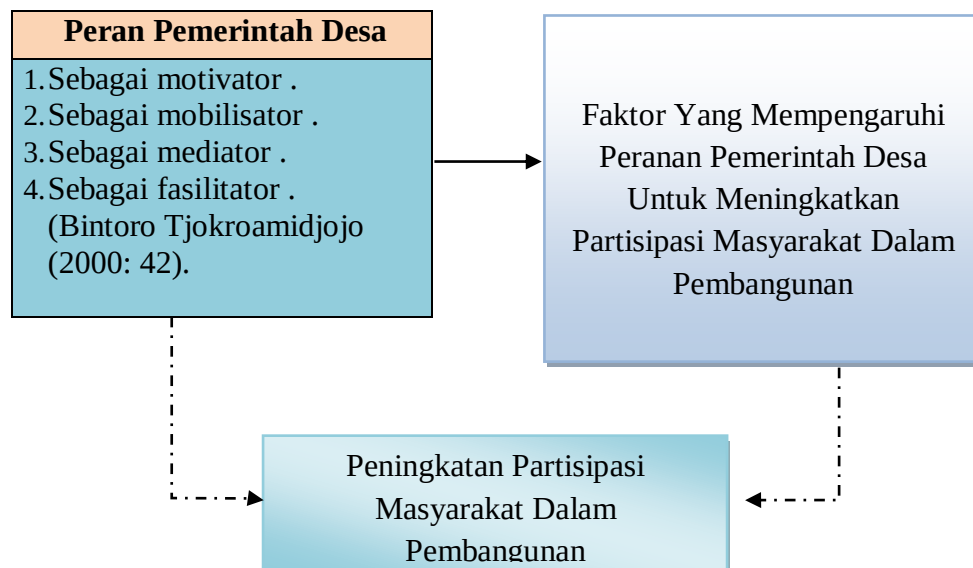
3. Anggi Setiawan (2013). Dengan judul “Peran Kepala Desa Terhadap Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur”. Peran kepala desa selaku pemerintah desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai kepala desa untuk memotivasi warga, memfasilitasi warga dalam kegiatan pembangunan desa, serta menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan lainnya. Dengan demikian secara langsung kepala desa sudah memberikan kesadaran bahwa pentingnya kerja sama di dalam proses pembangunan yang nantinya dapat di nikmati secara bersama-sama. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepala desa dalam menggalang swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa bumi rapak kecamatan kaubun kabupaten kutai timur adanya hubungan kerjasama antara kepala desa dengan masing-masing RT dan peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa bumi rapak sudah berjalan dengan baik, kepala desa selaku pemerintah desa telah menjalankan

perannya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai kepala desa.

Dari penelitian terdahulu, yang memiliki variable yang sama dalam penelitian ini yaitu Hendra Mondong, 2015. Dalam penelitian tersebut mengkaji bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.

C. Alur Pikir

Dalam menjalankan pemerintahan desa, perlu adanya peranan kepala desa sebagai pemimpin formal di desa yang merupakan administrator pemerintah, administrator masyarakat dan administrator pembangunan dalam menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Berikut ini dapat digambarkan alur pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian (2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara keseluruhan dan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong 2010: 6).

Menurut Sukmadinata (2009: 53-60), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Sukmadinata (2009: 18), menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang disebut dengan narasumber.

B. Penetapan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Jumlah masyarakat di Desa Sajau Hilir kurang lebih mencapai 896 jiwa. Penelitian ini dengan Sasaran yang dituju adalah Peranan pemerintah desa Desa Sajau Hilir dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam rangka pembangunan desa.

C. Fokus Penelitian

Perumusan fokus masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan. Menurut Moloeng (2000: 55), *fokus* penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, walaupun data itu menarik.

Berdasarkan pada rumusana masalah yang ditentukan, maka fokus penelitian terhadap peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat di Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

1. Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.
2. Faktor yang mempengaruhi Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.

D. Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan merupakan orang yang akan diwawancarai sesuai dengan pedoman wawancara yang ada. Adapun informan yang ditentukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa Sajau Hilir.
2. Sekertaris Desa Sajau Hilir
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sajau Hilir

4. Ketua RT Desa Sajau Hilir 5 orang.
5. Tokoh masyarakat Desa Sajau Hilir sebanyak 7 orang.
6. Masyarakat Desa Sajau Hilir sebanyak 13 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini adalah: Dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif. Yaitu: pengamatan (obsevasi), wawancara (interview), dan dokumentasi (documentation). Menurut Sugiyono (2005: 62), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Pengamatan (observasi)

Obsevasi yaitu dilakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

Observasi hakikatnya juga merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indra, bias penglihatan, penciuma, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi partisipasi pasif. Yang dimaksud dengan observasi partisipasi pasif menurut Sugiyono

(2008: 64) yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di Desa Sajau Hilir.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2006: 186).

Teknik pengumpulan data dengan melakukan interview mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sajau Hilir. Wawancara dilakukan dengan responden yang sudah ditentukan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi (documentation)

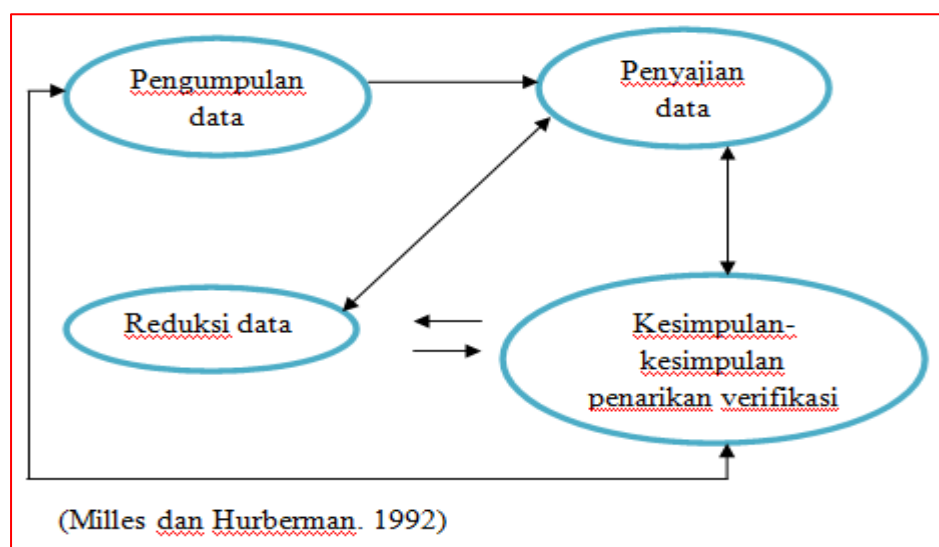
Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal kegiatan, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, dan sebagainya. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Arikunto (2010: 274) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan. Pendekatan dalam

metode analisis ini adalah dengan menggunakan analisis interaktif yang menurut Milles dan Hurbeman (1992: 20) adalah selama proses pengumpulan data penelitian harus siap bergerak diantara empat sumbu kumpulan itu selama pengumpulan data selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan verifikasi.

Gambar 3.1 : Model Analisis Data Interaktif



Adapun penjelasan menurut gambar 3.1 sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data tersebut harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa.

2. Tahap reduksi data

Pada tahap ini peneliti mulai menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan proses verifikasi.

3. Tahap penyajian data

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun sekumpulan informasi atau data yang diperoleh sebelumnya agar peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Pada tahap ini peneliti mencoba mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab akibat, dan proposisi. Selanjutnya pada tahap verifikasi penelitian mencoba memperdalam proses observasi dan wawancaranya untuk mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Sajau Hilir berawal dari salah satu daerah di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur yang mana Desa Sajau Hilir merupakan Desa hasil pemekaran dari Desa Induk dan mempunyai 3 Dusun pada waktu itu.

Pada tahun 1991 pengelolaan desa diserahkan kepada pemerintah daerah dan selanjutnya dilakukan pemilihan kepala Desa yang pertama dan terpilih **Bapak H Amir**. Pada masa pemerintahan kepala Desa pertama ini kegiatan Desa Sajau banyak digunakan untuk menata pembagian wilayah desa dimana pada saat itu desa Sajau Hilir dibagi menjadi tiga bagian Dusun. Dimana yang menjabat sebagai kepala dusun I adalah Bapak Kube, kemudian kepala dusun II adalah Bapak Hanafiah.M dan kepala dusun III adalah Bapak Datuk Anye. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian.

Selanjutnya setelah satu periode masa pemerintahan Bapak H. Amir, masyarakat Desa Sajau kembali memilih Kepala Desa pada tahun 1996 dan yang terpilih bernama Bapak **Jamaluddin**, pemilihan kepala Desa dilakukan secara langsung yang diikuti oleh tiga orang calon.

Pada Periode pemerintahan Bapak Jamaluddin, Desa Sajau hilir telah resmi menjadi salah satu desa hasil pemekaran dari desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupatten Bulungan secara Administratif berdasarkan surat Keputusan (SK) yang telah dikeluarkan.

Selanjutnya pada tahun 2002 dilakukan pemilihan kepala Desa yang ketiga dengan cara seperti pemilihan desa sebelumnya. Kemudian yang terpilih adalah Bapak Ramadhan B. pada masa periode pemerintahan ini banyak warga desa yang pindah keluar desa akibat dari buruknya kondisi ekonomi di desa (Defisit) namun pada masa periode ini juga telah mengupayakan pembangunan gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) dan pembuatan program Perencanaan Pembangunan Menengah Desa (PPMD) desa.

Pada tahun 2007 dilakukan pemilihan kepala desa yang ke empat dan yang terpilih adalah Bapak Yambo Krisman. Di bawah pemerintahan Bapak Yambo Krisman, pemerintah Desa menyetujui adanya pembukaan lahan Perusahaan Kelapa Sawit di wilayah Sajau Hilir sehingga pada masa ini penduduk transmigrasi mulai masuk ke desa Sajau Hilir selain itu pada masa periode ini juga melakukan pembangunan fasilitas desa secara besar besaran.

Dan kepala Desa ke lima adalah Bapak M.Satar Tahang dimana beliau terpilih pada tahun 2013 dan menjabat sampai sekarang. Pada masa ini pembangunan potensi desa Sajau Hilir dengan Indikator Unggulan yaitu Padi sawah, Perkebunan dan Perikanan yang dijadikan sebagai pola hidup masyarakat desa sehingga perekonomian desa membaik dan stabil sampai saat ini pada masa periode pemerintahan ini juga program yang dilaksanakan adalah salah satunya memberikan sarana pendidikan masyarakat desa berupa pembangunan Ruang Belajar Masyarakat (RBM).

2. Letak Geografis

Desa Sajau memiliki luas ± 4914 Ha yang sampai akhir tahun 2018 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Selor
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa pura Sajau
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Binai
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut.

3. Di Tinjau dari Orbitasi

- a) Jarak ke kecamatan 35 km.
- b) Lama Tempuh ke kecamatan 45 menit
- c) Jarak ke ibu Kota Kabupaten 50 km
- d) Lama Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 60 Menit
- e) Kendaraan Umum ke Ibu Kota Kabupaten Taksi .

4. Keadaan Topografi Desa.

Keadaan umum Desa Sajau Hilir berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan air laut dapat dibedakan dari pegunungan disebelah selatan serta dataran laut disebelah Timur dengan ketinggian kurang lebih 20 m dari permukaan laut.

Secara Umum Keadaan Topografi desa Sajau adalah merupakan Daerah gunung dan Dataran.

5. Iklim

Desa Sajau mempunyai Iklim Tropis (2 Iklim)

- a) Musim penghujan
- b) Musim Kemarau.

6. Kependudukan

Data Desa Penduduk Merupakan jumlah Keseluruhan Warga desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, dimana terdiri dari data laki-laki, perempuan, jumlah KK, jumlah rumah, RT, RW, Jumlah Muslim, dan Kristen. Dapat di lihat dari hasil Pemetaan Sosial di tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Kependudukan

No.	Kependudukan	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah Penduduk	1573	Jiwa
2.	Jumlah Laki-laki	922	Jiwa
3.	Jumlah perempuan	651	Jiwa
4.	Jumlah KK	428	KK
5.	Jumlah Rumah	360	Unit
6.	Jumlah RT	8	wilayah
7.	Jumlah RW	0	
8.	Jumlah Penduduk islam	1538	Jiwa
9.	Jumlah Penduduk Kristen	35	Jiwa

Sumber : Kantor Sajau Hilir 2020

7. Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah

Tabel 4.2 Usia Sekolah

No	Usia Sekolah	Jumlah	Keterangan
1.	7-12 tahun	234	Jiwa
2.	13-15 tahun	116	Jiwa
3.	16-18 tahun	182	Jiwa

Sumber : Kantor Sajau Hilir 2021

8. Jumlah Penduduk menurut Mata pencarian

Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1.	Karyawan Swasta	61	Jiwa
2.	Buruh Tani	23	Jiwa
3.	Pedagang	21	Jiwa

4.	Pegawai Negeri Sipil	12	Jiwa
5.	Honorar	4	Jiwa
6.	Nelayan	34	Jiwa
7.	petani	886	Jiwa

Sumber : Kantor Sajau Hilir 2020

9. Jumlah Penduduk Menurut Pola Penggunaan Tanah

Tabel 4.4 Penduduk Menurut Pola Penggunaan Tanah

No	Uraian	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	10
2.	Lahan Sawah	500
3.	Lahan Kering	400
4.	Tanah Basah	1000
5.	Tanah perkebunan	3000
6.	Fasilitas Umum	4
7.	Hutan	-
Total Luas		4914

Sumber : Kantor Sajau Hilir 2020

10. Sarana Dan Prasarana Desa

Tabel 4.5 Sarana/Prasarana Desa Sajau Hilir

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1.	Balai Desa	1 Unit	Layak pakai
2.	Kantor Desa	1 Unit	Layak pakai
3.	Puskesmas Pembantu	1 Unit	Layak pakai
4.	Masjid	4 Unit	Layak pakai
5.	Gedung PKK	1 Unit	Layak pakai
6.	Pos Kamling	3 Unit	Layak pakai
7.	Taman Kanak-Kanak	1 Unit	Layak pakai
8.	Posyandu	2 Unit	Layak pakai
9.	SD Negeri	1 Unit	Layak pakai
10.	Balai Pertemuan	1 Unit	Layak pakai
11.	Tempat Pemakaman Umum	1 Lokasi	
12.	Sungai	±17 km	
13.	Jalan Tanah	10.000 m ²	
14.	Jalan Koral	5.000 m ²	
15.	Jalan Poros/Hot Mix	1.500 m ²	

16.	Jalan Aspal Penetrasi	500 m2	
17.	Sumur Bor	7 Unit	Rusak Berat
18.	Dermaga	2 Unit	Layak pakai
19.	Pasar Desa	1 Unit	Layak pakai

Sumber : Kantor Sajau Hilir 2020

11. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sajau hilir secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori Rentan, miskin, sedang dan Mampu. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti Karyawan Swasta, buruh tani, petani ladang, perkebunan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis dll.

12. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Sajau Hilir dibagi menjadi 8 RT, dan masing-masing RT telah dibagi menjadi wilayah secara khusus sementara pusat Desa berada di RT III, setiap RT dipimpin oleh seorang Ketua RT. sebagian RT di desa Binai tidak berada di lokasi atau pemukiman desa secara langsung tetapi sebagian RT ada di daerah atau lokasi di sungai Binai yang mayoritas masyarakat di sana adalah suku Punan.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan hasil yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didasarkan pada rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian tentang peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan di Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

1. Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sajau Hilir

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan. Oleh karena itu, kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan memegang peran penting yaitu sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan sebagai mobilisator.

Adapun peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sajau Hilir sebagai berikut :

a. Sebagai Motivator

Pentingnya peranan motivator dalam proses pembangunan desa dan perlu dipahami oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa di Desa Sajau Hilir agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada masyarakat desa setempat. Kepala Desa sebagai motivator harus mampu memotivasi masyarakat terlibat aktif serta dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang ingin dicapai nantinya dapat

terlaksana dengan baik tanpa ada perselisihan diantara pemerintah desa dan masyarakat setempat. Kepala Desa harus mampu memberikan dorongan terhadap masyarakat untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga dapat mencapai tujuan tertentu guna memenuhi/memuaskan suatu kebutuhan masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mulyadi selaku PJ Kepala Desa Sajau Hilir selalu mengatakan yaitu:

“Saya sebagai kepala Desa Sajau Hilir selalu memberikan motivasi kepada masyarakat dalam terlibat dalam perencanaan pembangunan, memelihara pembangunan yang ada, dan memberikan masukan dan saran kepada masyarakat dalam menjaga dan memelihara pembangunan yang sudah ada agar tetap terjaga dan terpelihara untuk kepentingan masyarakat pada umumnya”. (Wawancara, 26 Juli 2020).

Sebagai kepala pemerintah desa dalam hal ini sebagai motivator telah bekerja sama dengan masyarakat yaitu bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan desa dengan cara memberikan dorongan-dorongan dan semangat kepada masyarakat. Dapat dilihat bahwa motivasi dari Kepala Desa dapat mendorong dan memberikan kesadaran kepada masyarakat desa Desa Sajau Hilir akan pentingnya kerja sama dalam sebuah proses pembangunan.

Kepala Desa sebagai motivator telah memberikan motivasi atau dorongan kepada warga desa untuk ikut dalam kegiatan pembangunan desa. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa di tingkat Dusun dari 8 RT diantaranya, perbaikan jalan, jembatan di Desa Sajau Hilir, perbaikan parit/got dan semenisasi, serta pembersihan lingkungan masyarakat Desa. Karena dengan dukungan dari masyarakat Kepala Desa sebagai motivator akan selalu dinantikan oleh masyarakat dan juga sebaliknya

Kepala Desa mengharapkan dukungan dari masyarakat agar pelaksanaan pembangunan di Desa Sajau Hilir dapat berjalan dengan baik.

Keterlibatan Kepala Desa dalam kegiatan gotong royong merupakan salah satu cara untuk memotivasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Demikian halnya yang disampaikan Ketua RT 5 Sajau Hilir mengatakan yaitu:

“Bentuk motivasi yang diberikan berupa, arahan, pemberian pengolahan pembangunan desa, serta ajakan peduli terhadap desa. Kegiatan aktivitas di Desa Sajau Hilir seperti gotong royong, Beliau selalu terlibat dalam pekerjaan yang kami lakukan. Beliau selalu menyampaikan hal-hal yang akan kami lakukan kedepan untuk kebaikan bersama, dan dengan tegas mengatakan menjaga keamanan desa “ (Wawancara, 26 Juli 2020).

Dalam pelaksanaan pembangunan, swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dapat ditingkatkan dan dapat mendukung serta memperlancar pembangunan, maka perlu adanya suatu Peran Kepala Desa yang mampu menggerakkan dan memotivasi masyarakatnya.

Dari pernyataan di atas adapun tabel kegiatan pembangunan yang dapat penulis lampirkan yaitu kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa sebagai motivator yaitu:

Tabel 4.6 Tabel Perencanaan Kegiatan Pembangunan

Kegiatan	Awal kegiatan	Pelaksanaan	Akhir Kegiatan
Kegiatan Gotong- royong	Gotong- royong Kepala Desa memberikan dorongan kepada warga melalui masing-masing RT untuk melakukan kegiatan gotong-	Kepala Desa bersama warga melakukan perbaikan jalan, perbaikan irigasi dan jembatan, damaga.	Hingga sekarang jalan usaha tani sudah dapat dipakai atau difungsikan sebagai jalan utama milik warga untuk menuju ke area

	royong.		pertanian.
Pembangunan peningkatan infrastruktur pedesaan	Membahas program-program pembangunan.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa.	Terpenuhinya sarana dan prasarana desa.

Sumber data: Kantor Desa Sajau Hilir Tahun 2020

Kepala Desa sebagai motivator, tidak lain agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar terselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dengan begitu maka terlihat jelaslah bahwa peran Kepala Desa sebagai motivator sangat diperlukan dalam proses pembangunan desa guna untuk memperlancar pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Berdasarkan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari masyarakat Desa Sajau Hilir karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Desa sangat diperlukan dan dinantikan oleh masyarakat desa.

Sebagai bukti nyata proses pemberdayaan masyarakat yaitu dilibatkannya masyarakat dalam proses penggalan gagasan arah pembangunan desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) sebagai acuan dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) yang selanjutnya di terapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Dalam proses pelaksanaannya pun pemerintah desa melibatkan kelompok-kelompok kecil sebagai pelaksana kegiatan terutama kelompok masyarakat setempat, sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah desa telah berupaya secara optimal untuk memberdayakan sumber daya yang ada dalam rangkaian proses pelaksanaan pembangunan desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis pun melakukan wawancara langsung dengan Staf Desa Sajau Hilir yang bersama-sama kepala desa bekerja dalam membangun dan melayani masyarakat desa yaitu Pak Masse Sekdes Desa Sajau Hilir, beliau menyatakan:

“Pada saat rapat Kepala Desa senantiasa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, memberikan motivasi seperti mengajak bersama-sama masyarakat Desa Sajau Hilir membangun desa agar tidak ketinggalan dengan desa yang lainya. Kepala desa juga banyak memberikan motivasi berkaitan dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan sebaliknya juga beliau meminta masukan kepada staf-staf yang ada mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan.” (Wawancara, 26 Juli 2020).

Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat ketua BPD Desa Sajau Hilir mengemukakan bahwa:

“Kata-kata semangat dan motivasi yang diberikan kepada semua orang yang ada kadangkala beranekaragam selain melibatkan dan mempercayakan untuk bekerja melaksanakan tugas yang menantang dan hal ini juga mungkin meningkatkan kinerja kami selaku staf yang bertugas saat ini dengan demikian maka kami selaku staf desa merasa dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemerintah dan tentunya semakin kuat juga rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan yang hasilnya dapat dinilai oleh masyarakat”(Wawancara, 26 Juli 2020).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kepala Desa Sajau Hilir pada saat pengambilan keputusan dan dalam setiap keputusan selalu dilakukan atas partisipasi masyarakat dengan harapan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, karena keputusan ini dilakukan secara bersama-sama dan diharapkan partisipasi semua pihak benar-benar terlibat dari pimpinan hingga bawahan pemerintahan desa.

Kepemimpinannya kepala desa memberikan banyak pengaruh yang positif dengan berlaku bijaksana senantiasa terlibat dalam program yang direncanakan, dengan kata lain melihat tindakan yang dilakukan pemimpin yang aktif dalam masa jabatannya dan nasehat-nasehat ini akan memberi semangat bekerja dalam diri bawahan dan masyarakat desa sehingga mau turut serta dalam aktivitas pembangunan yang ada.

b. Sebagai Mobilisator

Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Mulyadi PJ Kepala Desa Sajau Hilir sebagai kepala desa yaitu:

‘Peran saya sebagai mobilisator sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang diprogramkan. Oleh karena itu saya harus mampu mengajak dan menggerakkan swadaya masyarakat Desa Sajau Hilir untuk bekerja sama dalam sebuah pembangunan.’ (Wawancara, 26 Juli 2020).

Menggerakkan masyarakat supaya bekerja sama tidaklah mudah, tetapi dalam hal ini, kepala desa tetap berupaya keras agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Saat mengajak masyarakat, kepala desa juga memberikan motivasi agar mereka mau tergerak untuk pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dibuat bukan untuk orang lain, melainkan untuk masyarakat Desa Sajau Hilir juga. Dengan adanya pembangunan yang memadai maka masyarakat juga akan merasakan manfaatnya dan dapat menggunakan sarana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Demikian juga pendapat Pak Masse Sekertaris Desa Sajau Hilir, beliau menyatakan:

“Peran kepala desa sebagai mobilisator yaitu menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting. Kepala desa menggerakkan masyarakat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan lainnya, mengajak masyarakatnya ikut serta dalam pembangunan, serta memberikan arahan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan pembangunan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.” (Wawancara, 26 Juli 2020).

Kepala Desa sebagai penggerak, pengawas pembangunan, pelopor pembangunan, dan peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD). Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan gotong-royong swadaya masyarakat.

c. Sebagai Mediator

Kepala Desa sebagai seorang mediator yang berperan secara optimal dalam melayani masyarakat dan juga sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam lingkup area kewenangannya. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa juga sebagai penampung aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan segala kewenangan yang ada padanya serta dapat menindak lanjuti apa yang menjadi harapan masyarakat Desa Sajau Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT 2 Desa Sajau Hilir mengatakan yaitu:

“sebagai kepala pemerintahan desa, peran kepala desa sebagai mediator untuk melaksanakan pembangunan desa sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sajau Hilir, dimana peran kepala desa sifatnya netral dan tidak memihak siapapun, membantu para pihak dalam mencari solusi serta berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antararganya”. (Wawancara, 28 Juli 2020).

Kepala desa mengajak masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi dengan sifat kekeluargaan. Hal itu bertujuan agar masalah yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan baik (dengan cara kekeluargaan) dan pada akhirnya masyarakatpun dapat bekerja sama dalam kegiatan pembangunan desa.

Kepala desa sebagai mediator sangat berperan dalam keamanan dan ketentraman masyarakat Desa Sajau Hilir. Untuk itu dalam menjalankan peran sebagai mediator, Kepala Desa Sajau Hilir melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan kemajuan pembangunan desa, adapun pelaksanaan yang dilakukan yaitu;

1) Penyelesaian Konflik

Keberadaan Kepala Desa sebagai unsur pimpinan tertinggi dilingkungan pedesaan, dalam menyelesaikan konflik-konflik di wilayahnya tentu akan melalui prosedur-prosedur berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah sehingga paham akan konflik yang terjadi dan langkah-langkah penanganannya dapat tercapai dengan baik.

Dari tanggapan masyarakat pada umumnya, Kepala Desa cukup baik dalam memainkan perannya dalam hal menanggapi setiap aspirasi masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Tokoh masyarakat Desa Sajau Hilir mengungkapkan yaitu;

“Perselisihan warga tidak setiap harinya terjadi, jika terjadi permasalahan biasanya masalah pribadi sehingga mengakibatkan konflik/perselisihan dan terjadi permasalahan atau konflik biasanya pada saat hari-hari raya, dan pesta-pesta rakyat yang diadakan secara terbuka. Dalam penyelesaian masalah tersebut Kepala Desa mengambil tindakan dan mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi agar masyarakat bisa hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat bekerja sama dalam kegiatan pembangunan”. (Wawancara, 28 Juli 2020).

Hal senada disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sajau Hiliryaitu:

“Di Desa Sajau Hilir bisa dikatakan perselisihan antara keluarga jarang terjadi siapapun itu atau dari kalangan apapun itu jika perselisihan terjadi kepala desa selalu mengambil bagian dalam menangani agar masalah tersebut tidak berlanjut, atas kebijaksanaan dan otoritas yang dimiliki Beliau, masalah yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan.” (Wawancara, 26 Juli 2020).

Situasi keamanan Desa Sajau Hilir cukup dikenal oleh masyarakat desa yang berdekatan dengan Desa Sajau Hilir pada umumnya, pada saat tahun baru barudan hari raya lainnya, masyarakat salah satu menjadi pusat perhatian dan tempat para aparat keamanan turun langsung di tempat yang dimaksud untuk menjaga terjadinya konflik.

Dalam mengatasi masalah tersebut Kepala Desa cukup profesional dalam memetakan permasalahan, dimana Kepala Desa melakukan pendekatan emosional yaitu sifat kekeluargaan dan apabila tidak penyelesaian maka akan diperkarakan secara adat.

2) Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu wadah yang keanggotaannya dimusyawarahkan/dimufatkan oleh dan dari Tokoh-tokoh masyarakat Desa yang berfungsi menerapkan peraturan Desa bersama kepada Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran perubahan nama ini tetap mengakomodir keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa tetap memperhatikan aspirasi masyarakat melalui wadah Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan segala aspirasi masyarakat Desa Sajau Hilir, Kepala Desa melakukan penyaringan aspirasi bagaimana mengklarifikasikan mana aspirasi yang jangka pendek dan mana yang jangka panjang. Setelah diklarifikasikan Kepala Desa mempersentasikan kepada jajarannya untuk dilaksanakan bersama jajarannya. Kemudian aspirasi-aspirasi tersebut disampaikan dan dikonsultasikan kepada pemerintah sehingga dapat dilaksanakan atau direalisasikan kepada masyarakat Desa Sajau Hilir.

3) Menjalankan Segala Program-Program Yang di Rencanakan

Melaksanakan segala program-program yang dicanangkan oleh Kepala Desa Sajau Hilir sendiri maupun program-program dari pemerintah sebelumnya melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Setelah dilakukan sosialisasi maka memantau dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap program-program yang disosialisasikan.

Dalam mensosialisaikan program-program pemerintah desa, Kepala Desa Sajau Hilir melakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT dan tokoh masyarakat untuk merealisasikan program yang direncanakan.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Masse Sekdes Desa Sajau Hilir mengatakan bahwa:

”Dalam mensosialisasikan program kerja Pemerintahan Desa, Kepala Desa mengundang Ketua-ketua RT, anggota BPD, Tokoh-tokoh masyarakat, dan Tokoh-tokoh pemuda, untuk menjelaskan atau mempersentasikan kepada undangan tentang tujuan maupun sasaran program kemudian setelah itu direalisasikan ke lapangan”. (Wawancara, 26 Juli 2020).

Kesepakatan yang diambil dalam pertemuan merupakan kesepakatan bersama, yang bertujuan agar masyarakat dapat menerima, berpartisipasi serta membantu kepala desa dalam merealisasikan program kerja pemerintahan Desa Sajau Hilir. Untuk dapat mengimplementasikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kepala desa, untuk itu sosialisasi yang tepat mengenai kegiatan prioritas yang akan dilakukan penting adanya, seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Daftar Program Kerja Yang Diprioritaskan Desa Sajau Hilir
Tahun 2019/2020

No	Program	Volume	Keterangan
1	Pembuatan Irigasi	250 M	Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) Desa Sajau Hilir
2	Semenisasi Halaman BPU dan Kantor Desa	1/2 Ha	
3	Pembuatan Jembatan Ulin	100 M	
4	Pembangunan Jalan dalam Desa	300 M	
5	Pembangunan Jalan Tani	400 M	
6	Pembangunan Air Bersih	-	

Sumber data: Kantor Desa Sajau Hilir Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa program yang disosialisasikan oleh kepala desa beserta staf untuk kepentingan masyarakat dan hal ini tentu saja mendapat tanggapan baik dari warganya, dengan demikian dilakukanlah realisasi dilapangan dan pemetaan program sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah dilaksanakan program untuk kesejahteraan masyarakat, maka Kepala Desa melakukan evaluasi bersama staf-staf desa untuk mencari kelemahan dan kelebihan dari pelaksanaan program di atas sehingga ke depan dapat ditingkatkan lagi program tersebut. Namun secara tidak langsung Kepala Desa Sajau Hilir telah cukup memuaskan dalam menjalankan program pembangunan desa.

Adapun tujuan dari program prioritas di atas untuk menggali dan mengolah sumber daya alam yang tersedia dengan upaya-upaya dari pemerimah desa, merencanakan pembangunan fisik yang mengena kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia, perencanaan pembangunan jalan desa, yang akan mendukung peningkatan distribusi hasil produksi pertanian masyarakat.

Kepala Desa sebagai mediator dalam pantauan peneliti yang terlihat dan nampak dalam aktivitasnya, Kepala Desa cukup meyakinkan dalam proses pembangunan. Dimana setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, Kepala Desa cukup antusias dalam menyelenggarakannya. Misalnya kegiatan syukuran, Kepala Desa selalu aktif dan partisipatif dalam proses berlangsungnya kegiatan tersebut. Setiap persoalan yang terjadi dalam desa pun kepala desa senantiasa ada untuk menyelesaikan, pandangan peneliti bahwa hal ini tentulah sangat tidak mudah jika setiap tanggung jawab dan

kesadaran pemimpin desa ini benar tidak dilaksanakan untuk itu bahwa Kepala Desa Sajau Hilir telah melaksanakan tugas dengan baik.

d. Sebagai Fasilitator

Peran Kepala Desa Sajau Hilir sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam menunjang setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan Desa, Kepala Desa berada pada posisi memfasilitasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan desa dalam beberapa bidang sesuai dengan sasaran program Desa Sajau Hilir diantaranya:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pedesaan untuk mendukung kreatifitas masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Memanfaatkan sarana dan prasarana desa demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah desa berupaya memfasilitasi khususnya yang diperlukan oleh masyarakat desa oleh karena dengan adanya sarana dan prasarana pendukung maka kelancaran aktivitas masyarakat desa pun dapat berjalan dengan baik, dan perekonomian masyarakat juga semakin berkembang atau membaik.

Seperti yang disampaikan Mulyadi selaku Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Sajau Hilir bahwa :

“Saya selaku pemimpin Desa Sajau Hilir selalu berupaya memberikan fasilitasi sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam membangun sebuah

desa baik berupa uang atau alat-alat bantu dalam pembangunan.". (Wawancara, 26 Juli 2020).

Peran kepala desa sebagai fasilitator harus mampu meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dan itu membutuhkan proses perubahan yang terus-menerus, untuk kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang lebih baik. Fasilitas yang disediakan oleh kepala desa kepada masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan berupa peralatan mesin rumput, senso, mesin lampu, cangkul, sekop, dan perlengkapan berupa bensin, semen, pasir, paku, papan, dan seng.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan Tokoh Masyarakat Desa Sajau Hilir, beliau menambahkan:

“Kepala Desa memfasilitasi pembangunan dan memberikan bantuan kepada masyarakat desa misalnya, meminjamkan alat-alat untuk kegiatan pembangunan fisik seperti perbaikan jembatan dan perbaikan parit maupun perbaikan jalan serta membantu setiap kegiatan masyarakat dengan beberapa cara sesuai ketentuan-ketentuan yang ada, misalnya dengan memberikan fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan pelatihan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kelompok tani yang bertujuan sebagai perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing dalam pembangunan desa.”(Wawancara, 28 Juli 2020).

Dengan adanya fasilitasi yang disediakan oleh Kepala Desa diharapkan masyarakat desa dapat mengikuti program-program desa yang sudah ada untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa karena untuk tahun ini saja program pembangunan fisik yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Dari rangkaian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan dapat dilihat perubahan yang signifikan khususnya pada percepatan pembangunan desa khususnya di Desa Sajau Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Sajau Hilir mengatakan bahwa:

“Kepala Desa Sajau Hilir memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan desa dan tidak dapat dipungkiri bahwa kades sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai pemimpin desa, tetapi dalam memfasilitasi kegiatan gotong royong masyarakat kepala desa selalu menyempatkan dirinya untuk kami walaupun kadang beliau hanya menemani kami sesaat dalam bekerja tetapi dengan adanya izin beliau kami dapat menggunakan fasilitas yang ada di desa untuk bekerja hal ini sangat membantu kami”. (Wawancara, 26 Juli 2020).

Peran Kepala Desa sebagai fasilitator cukup membantu masyarakat Desa Sajau Hilir, hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjadi Kepala Desa, hal itu dapat dilihat hingga sekarang karena telah banyak terlihat sarana dan prasarana yang di perbaiki, salah satu contoh misalnya di desa melakukan perbaikan jalan, perbaikan jembatan lainnya serta disamping itu banyak kegiatan yang dilakukan berupa pemberian bantuan atau memfasilitasi warga, dan bantuan sosial lainnya, dimana sekarang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa.

Berikut ini fasilitas rencana program kerja pelaksanaan pembangunan yang dapat mendukung masyarakat dalam beraktivitas untuk menunjang pembangunan desa:

Tabel 4.8

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa Desa Sajau Hilir

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) sebagai berikut :

1.	Pengadaan Pipa Air Bersih
2.	Tambatan Perahu
3.	Semenisasi Jalan Usaha Tani RT 5

4.	Penambahan Jembatan Dermaga RT.05
5.	Rehab Gor
6.	Tempat Pelelangan Ikan
7.	Jembatan
8.	Gorong-gorong
9.	Pembangunan Gedung TBM
10.	Pembuatan Balai Tani
11.	Poskambling
12.	Tempat Parkir
13.	Semenisasi Halaman Kantor
14.	KWH
15.	Pembuatan Pagar Makam
16.	Semenisasi Jalan Makam
17.	Pemeliharaan Jalan Semenisasi Jembatan Gantung
18.	Pemerlihaan Gedung BPU dan Tangga
19.	Rumah Singga
20.	Petugas Keamanan
21.	Rehab Kantor Desa
22.	Irigasi

Sumber data: Kantor Desa Sajau Hilir Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa sarana dan prasarana tersebut merupakan fasilitas yang disediakan oleh Kepala Desa Sajau Hilir yang diperoleh melalui anggaran dana desa. Kepala Desa menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa Kepala Desa mengarahkan atau menggerakkan masyarakat bersama-sama untuk melakukan perbaikan terhadap desanya, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, memperbaiki balai desa, perbaikan jembatan atau gorong-gorong, memperbaiki jalan, memperbaiki rumah warga yang kurang mampu, dan melakukan perbaikan darmaga Desa Sajau Hilir.

Dalam pembangunan yang ada saat ini tidak terlepas dari turut serta Kepala Desa Sajau Hilir dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang maju, yang ada seperti halnya pembangunan infrastruktur desa saat ini dalam

tahap penyelesaian seperti saluran irigasi untuk pertanian dan pelebaran saluran sungai yang melewati desa tatkala musim penghujan meluap mengakibatkan banjir, Kepala Desa mengikut sertakan masyarakat mengambil bagian pembangunan dalam mengatasi permasalahan desa.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sajau Hilir

Dalam melaksanakan peningkatan pembangunan diperlukan Sumber Daya Manusia yang mampu merencanakan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut secara partisipatif. Secara umum faktor yang mempengaruhi dalam koordinasi pembangunan ada yang berupa faktor pendukung dan faktor penghambat.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sajau Hilir dalam masa jabatan yang ada tentu saja mengalami berbagai faktor baik yang mendukung terlaksananya tugas maupun penghambat-penghambat yang senantiasa dihadapi oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Pemerintah Kabupaten Bulungan

Adanya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan pembangunan dalam memfasilitasi pembangunan desa yang ada antar Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa seperti fasilitas yang memadai seperti kendaraan dinas, kantor Kepala desa yang dilengkapi dengan

fasilitas elektronik, pemberian bantuan dana penunjang administrasi pemerintahan desa tahun anggaran 2019/2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyadi selaku PJ Kepala Desa Sajau Hilir mengatakan bahwa:

“Peran pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sajau Hilir sangat besar, dimana anggaran dana yang diperoleh desa untuk pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur yaitu jalan, jembatan, kantor kepala desa dan sarana-prasarana lainnya berasal dari Kabupaten”. (Wawancara, 26 Juli 2020).

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bersama Pak Masse Sekdes Desa Sajau Hilir menyampaikan bahwa :

Penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik karena didukung dengan pemerintah desa yang memberikan dana, selain itu pemerintah daerah (Kabupaten Bulungan) juga memberikan bantuan kepada masyarakat, misalnya bantuan pada masa pandemic Covid-19 berupa sembako (Wawancara, 26 Juli 2020).

Ditegaskan oleh ketua BPD Desa Sajau Hilir berpendapat bahwa :

sarana dan prasarana yang kami buat karena adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Bulungan yang mendukung, tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah, pembangunan tidak dapat berjalan. (Wawancara, 26 Juli 2020).

Keberadaan fasilitas yang telah dilengkapi oleh pemerintah Kabupaten untuk membantu Kepala Desa Sajau Hilir dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pembangunannya adanya kendaraan dinas sebuah sepeda motorsangat memudahkan kepala desa untuk menjangkau mitra kerja yang ada di dalam desa baik itu bawahan maupun lembaga-lembaga yang ada di dalam desa, demikian pulaa segala urusan yang dilakukan Kepala Desa Sajau Hilir.

Fasilitas Kantor desa yang ada juga memberikan kesempatan pelayanan Kepala Desa untuk memproses urusan masyarakat dalam desa sehingga dapat

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur sangat positif ada pun gedung balai desa yang berdiri megah juga sangat membantu dalam pelaksanaan rapat-rapat desa, balai desa ini juga dapat digunakan gedung serba guna oleh karena ukuran yang besar sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan pesta rakyat, dan digunakan sebagai gedung olahraga yang terbuka untuk umum seluruh masyarakat sekitar ini juga menjadi daya tarik tersendiri Desa Sajau Hilir yaitu gedung serbaguna.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam ruang lingkup Desa Sajau Hilir yang termasuk sumber daya manusia yang memiliki peran sangat penting untuk melaksanakan pembangunan desa yaitu aparatur pemerintah desa. Aparatur Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program dalam meningkatkan pembangunan pada desa yang bertujuan untuk pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mase sekretaris desa Sajau Hilir mengatakan bahwa:

“Kami sebagai tenaga kerja yang ada di kontor Desa Sajau Hilir selalu berkomitmen untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kami, selain itu kami juga bekerja sebagai satu tim yang saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik, enta dengan Kepala Desa, staf yang lainnya dan terutama dengan masyarakat pada umumnya” (Wawancara, 26 Juli 2020).

Pendapat di atas didukung dengan pendapat Pak Mulyadi selaku Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Sajau Hilir menyampaikan bahwa :

Salah satu faktor pendukung dalam menjalankan pemerintah desa karena adanya dukungan dari staf desa yang terlibat dalam kegiatan program desa. staf desa sangat berperan dalam mendukung peran

kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa (Wawancara, 26 Juli 2020).

Adanya kerja sama yang saling mendukung dari bawahan kepada kepala desa dengan bersikap loyal terhadap otoritas kepala desa dengan penghargaan kepercayaan menangani setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat dan mewakili penyampaian aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa kepada pemerintah daerah. Selain itu karena jarak antara staf dengan masyarakat desa yang tidak jauh serta adat istiadat yang sama memudahkan kepala desa untuk menjangkau dan memahami karakter masyarakat desa sehingga memudahkan untuk bekerja sama dalam melaksanakan program kerja.

3. Partisipasi Masyarakat

Bentuk konkrit dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan Desa Sajau Hilir berupa kehadiran masyarakat pada saat menyusun rencana program kerja serta pelaksanaan program kerja. Bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan saran dan pendapat dalam pembangunan, yang terpentingnya kehadiran masyarakat dalam mengikuti kegiatan gotong-royang perbaikan jalan, jembatan dan irigasi desa.

Seperti yang disampaikan Mulyadi selaku Penanggung Jawab (PJ)

Kepala Desa Sajau Hilir bahwa:

“Faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sajau Hilir yaitu karena keterlibatan masyarakat yang aktif terlibat dan ada juga yang kurang aktif. Oleh karena itu kepala desa harus mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan di desa” (Wawancara, 26 Juli 2020).

Pendapat tersebut ditegaskan oleh seorang anggota BPD, Desa Sajau Hilir mengatakan bahwa :

Pemerintah tidak bisabekerja sendiri dengan maksimal, dan tidak akan dapat memenuhi harapan masyarakat jika tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dase. Jadi selama ini salah satu faktor pendukung peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat karena adanya keterlibatan masyarakat desa, misalnya kegiatan dalam kerja bakti, kegiatan dalam menyampaikan aspirasi, dan keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur desa (Wawancara, 28 Juli 2020).

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan mempercepat proses pembangunan yang dilaksanakan dan tidak membutuhkan dana yang terlalu besar karena dilakukan dalam kegiatan gotong-royong.

b. Faktor Penghambat

1. Dana Terbatas

Desa Sajau Hilir pada awalnya tidak banyak melakukan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan keterbatasan pada kemampuan keuangan desa yang dimiliki. Untuk anggaran keuangan yang diperoleh desa masih terbatas untuk melakukan kegiatan pembangunan, hanya untuk kegiatan oprasional desa kemampuan angaran digunakan. Sumber dana sebagai faktor yang tidak terpisahkan dari pembangunan.

Demikia hasil wawancara dengan Pak Mulyadi selaku Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Sajau Hilir menyampaikan bahwa :

Selama ini memang yang selalu menjadi penghambat dalam pembangunan di desa sajau Hilir yaitu keterbatasan dana. Dana memang ada dari pemerintah daerah tetap tidak banyak program desa yang bisa direalisasikan. salah satu perencanaan pembangunan yang kita mau buat yaitu adanya perbaikan irigasi, tetapi tidak teralisasi karena dana yang terbatas. (Wawancara, 26 Juli 2020).

Pendapat yang sama disampaikan oleh Pak Masse Sekertaris Desa Sajau Hilir bahwa :

Dana kita memang terbatas, banyak program desa yang tidak terealisasi karena dana yang terbatas, ditamba dengan pandemik covid-19, dana untuk pembangunan dibatasi, dan lebih banyak kepada penanganan covid-19. (Wawancara, 26 Juli 2020).

Keterbatasan anggaran yang dialami oleh Desa Sajau Hilir menyebabkan pembangunan yang ada mengalami keterbatasan, yang seharusnya pembangunan bisa mencapai maksimal menjadi terbatas. Pemerintah Desa mesti mencari terobosan agar mendapatkan anggaran tambahan untuk meningkatkan pembangunan fisik dan begitu pula dengan pembangunan non fisik yang ada di desa.

2. Pendidikan Sumber Daya Aparatur Desa

Aparatur Desa Sajau Hilir pada faktanya apabila ditinjau dari tingkat pendidikan kebanyakan masih rendah. Apabila secara teori tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Aparatur Pemerintah Desa memiliki tingkat pendidikan yang relatif masih rendah dan mempengaruhi kinerja dari aparatur pemerintah desa itu sendiri dalam melaksanakan serta meningkatkan pembangunan. Kemampuan aparatur dalam penggunaan dan pengopersian komputer masih kurang, ketika ada tugas yang bersifat administratif, maka staf desa akan mengalami kesulitan.

berikut ini hasil wawancara dengan Pak Mulyadi selaku Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Sajau Hilir berpendapat bahwa :

Pada dasarnya pendidikan yang tinggi akan berpengaruh terhadap kinerja, dan sebaliknya. Aparatur di desa Sajau Hilir bisa dikatakan bahwa pendidikan masih rendah, ada beberapa yang sarjana dan ada

yang tidak. tentu rendanya pendidikan aparatur desa berdampak kepada kinerja. (Wawancara, 26 Juli 2020).

Ditegaskan oleh Pak Masse Sekertaris Desa Sajau Hilir berpendapat bahwa :

Pendidikan aparatur desa masih tergolong renda karena belum sarjana, dan ada sebagian aparatur desa yang mengalami kesulitan menggunakan komputer. (Wawancara, 26 Juli 2020).

Rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa Sajau Hilir berdampak kepada kinerja aparatur desa. Rendanya pendidikan juga berdampak kepada pemahaman dan pengetahuan aparatur desa dalam memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan solusi dalam menangani permasalahan di desa dan pemahaman dalam menganalisis permasalahan yang ada.

3. Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat tetap menjadi kendala dalam kegiatan pembangunan, dimana sebagian masyarakat tidak mau terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan mereka lebih cenderung pasif ketika ada pengumuman kegiatan gotong royong masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan bahwa:

“Ada sebagian masyarakat yang sama sekali tidak mau terlibat dalam kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan, padahal pembangunan tersebut juga dimanfaatkan oleh mereka” (Wawancara, 26 Juli 2020).

Kesadaran masyarakat yang tidak mau terlibat dalam kegiatan pembangunan masih kurang sehingga berdampak kepada masyarakat lainnya yang tidak termotivasi karena terpengaruh dengan masyarakat yang tidak mau ambil bagian dalam proses pembangunan.

Selanjutnya pak Mulyadi selaku Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Sajau Hilir menyampaikan pendapat yang sama:

“Dalam pelaksanaan pembangunan ada saja sebagian masyarakat yang tidak mau terlibat dan mereka menghindari dari kegiatan gotong royong yang dilaksanakan. Sikap yang seperti itu, berdampak kepada masyarakat yang aktif dalam kegiatan gotong-royong” (Wawancara, 26 Juli 2020)

Sebagian masyarakat sengaja menghindari dan tidak mau terlibat dalam kegiatan pembangunan, mereka lebih mementingkan urusan pribadi dibandingkan kegiatan untuk kepentingan umum. Masyarakat yang acuh-tak acuh dengan kegiatan gotong royong lebih cenderung suka menyendiri dan kurang bergaul dengan masyarakat.

C. Pembahasan

1. Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sajau Hilir

Kepala Desa Sajau Hilir sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan desa yaitu peran kepala desa sebagai fasilitator, sebagai mediator, dan sebagai motivator.

Kepala Desa Sajau Hilir sebagai motivator dalam pembangunan desa, selalu memberikan motivasi kepada masyarakat dalam rangka pembangunan desa, hal tersebut dilakukan dengan cara berpartisipasi langsung dalam kegiatan gotong royong masyarakat, dan memberikan masukan dan saran kepada masyarakat dalam menjaga dan memelihara pembangunan yang sudah ada agar tetap terjaga dan terpelihara.

Pemerintah desa dalam hal ini, kepala desa sebagai motivator sudah berjalan dengan baik dalam hal mendorong dan memberi semangat kepada masyarakat desa untuk bersama-sama dalam pembangunan yang ada di Desa Sajau Hilir. Dengan adanya motivasi yang diberikan kepala desa, masyarakat termotivasi untuk mengikuti program kerja yang dibuat oleh kepala desa dalam rangka pembangunan desa. Bentuk atau wujud motivasi tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan partisipasi dari masyarakat langsung dalam kegiatan pembangunan jalan, jembatan, perbaikan paret, perbaikan gorong-gorong, perbaikan pipa air bersih, serta kegiatan gotong royong pembersihan di lingkungan sekitar masyarakat desa. Masyarakat desa sadar bahwa tanpa adanya campur tangan langsung dari masyarakat dalam pembangunan yang telah di programkan kepala desa tidak dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Oleh karna itu dengan adanya peranan kepala desa sebagai pendorong, bimbingan dan sekaligus pemberi semangat kepada masyarakat sangat bermanfaat demi kemajuan dalam pembangunan di desa.

Peran kepala Desa Sajau Hilir sebagai motivator dalam pembangunan desa tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dijelaskan dalam Pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berwenang mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Sebagai kepala pemerintah desa dalam hal ini sebagai motivator telah bekerja sama dengan masyarakat yaitu bersama-sama dalam meningkatkan

pembangunan desa dengan cara memberikan dorongan-dorongan kepada warga, disini dapat dilihat bahwa dorongan dari Kepala Desa selalu dilakukan dengan tujuan bahwa hal tersebut memberikan kesadaran kepada masyarakat desa khususnya Desa Sajau Hilir akan pentingnya kerja sama dalam sebuah proses pembangunan. Selain itu, dengan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari masyarakat Desa Sajau Hilir karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Desa sangat di perlukan dan dinantikan oleh masyarakat desa.

Menurut Anggi Setiawan (2013: 2) agar swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dapat ditingkatkan dan dapat mendukung serta memperlancar pembangunan, maka perlu adanya suatu Peran Kepala Desa yang mampu menggerakkan dan memotivasi masyarakatnya. Hal ini terlihat bahwa peran Kepala Desa sebagai motivator telah memberikan motivasi atau dorongan kepada warga desa untuk ikut dalam kegiatan pembangunan desa. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa di tingkat Dusun dari 8 RT diantaranya, perbaikan jalan usaha tani dan perbaikan jembatan di Desa Sajau Hilir, perbaikan parit/got dan semenisasi, pembuatan saluran air bersih, perbaikan gorong- gorong serta pembersihan lingkungan masyarakat Desa Sajau Hilir. Karena dengan dukungan dari masyarakat Kepala Desa sebagai motivator akan selalu dinantikan oleh masyarakat dan juga sebaliknya Kepala Desa mengharapkan dukungan dari masyarakat agar pelaksanaan pembangunan Desa dapat berjalan dengan baik.

Peran kepala desa sebagai mobilisator yaitu menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting. Kepala desa menggerakkan masyarakat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan lainnya, serta memberikan arahan kepada masyarakat untuk terlibat secara

langsung dalam kegiatan pembangunan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Kepala Desa sebagai penggerak, pengawas pembangunan, pelopor pembangunan, dan peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong swadaya masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD). Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di desa adalah penyelenggara dan penanggungjawab dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat.

Kepala Desa sebagai fasilitator selalu berupaya untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan mereka terutama dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat desaserta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Fasilitas-fasilitas yang ada di desa saat ini merupakan wadah utama bagi masyarakat melaksanakan kegiatan. Fasilitas yang ada berupa balai desa, jalan, jalan Desa, jembatan, gereja, musolah, posyandu, poskamling, PKK, lapangan olahraga, air bersih dan saluran irigasi. Semua ini boleh ada berkat kepala desa saat ini yang selalu mengajak masyarakat membangun, memperbaiki dan memelihara semua fasilitas umum yang penggunaannya untuk meningkatkan kualitas masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan.

Menurut Wayan Mahayana (2013) Kepala Desa mengerakkan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa Kepala Desa mengarahkan atau menggerakkan masyarakat bersama-sama untuk melakukan perbaikan terhadap desanya, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, memperbaiki balai desa, perbaikan jembatan atau gotong-goyong, memperbaiki jalan, melakukan penanaman pohon jangka panjang, dan membantu sekolah-sekolah yang sedang melakukan perbaikan.

Kepala Desa Sajau Hilir sebagai fasilitator dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa cukup baik, hal ini berdasarkan pada realisasi pembangunan yang sudah ada dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dijelaskan dalam Pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam hal ini Kepala Desa Sajau Hilir memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan desa dan tidak dapat dipungkiri bahwa kades sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai pemimpin desa, tetapi dalam memfasilitasi kegiatan gotong royong masyarakat Kepala Desa selalu menyempatkan dirinya untuk bekerja dan masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang ada di desa untuk bekerja hal ini sangat membantu masyarakat.

Peran kepala desa sebagai mediator untuk melaksanakan pembangunan desa sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sajau Hilir, dimana peran kepala desa sifatnya

netral dan tidak memihak siapapun, membantu para pihak dalam mencari solusi serta berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warganya desa.

1) Mengatasi Konflik

Di Desa Sajau Hilir bisa dikatakan perselisihan antara keluarga jarang terjadi siapapun itu atau dari kalangan apapun itu jika perselisihan terjadi, Kepala Desa selalu mengambil bagian dalam menangani agar masalah tersebut tidak berlanjut, atas kebijaksanaan dan otoritas yang dimiliki beliau, masalah yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan. jika keadaan sulit ditangani beliau akan membawa masalah itu ke jalur hukum Negara. Dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang: membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, dan membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Perselisihan warga tidak setiap harinya terjadi, jika terjadi permasalahan biasanya masalah pribadi sehingga mengakibatkan konflik/perselisihan perkelahian dan terjadi permasalahan atau konflik biasanya pada saat hari-hari raya, dan pesta-pesta rakyat yang diadakan secara terbuka. Dalam penyelesaian masalah tersebut Kepala Desa mengambil tindakan dan memberikan pemahaman pentingnya hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat

2) Penampung dan Penyulur Aspirasi Masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu wadah yang

keanggotaannya dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh dan dari tokoh-tokoh masyarakat Desa yang berfungsi menerapkan peraturan Desa bersama kepada Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Terbentuknya penyalur aspirasi masyarakat ini bermula Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender dan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.

Dalam melaksanakan segala aspirasi masyarakat Desa Sajau Hilir, Kepala Desa melakukan penyaringan aspirasi bagaimana mengklarifikasikan mana aspirasi yang jangka pendek dan mana yang jangka panjang. Setelah diklarifikasikan Kepala Desa mempresentasikan kepada jajarannya untuk dilaksanakan bersama. Kemudian aspirasi-aspirasi tersebut disampaikan dan dikonsultasikan kepada pemerintah sehingga dapat dilaksanakan atau direalisasikan kepada masyarakat Desa Sajau Hilir.

3) Menjalankan Program-Program Yang diRencanakan

Melaksanakan segala program-program yang dicanangkan oleh Kepala Desa Sajau Hilir sendiri maupun program-program dari pemerintah sebelumnya melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Setelah dilakukan sosialisasi maka memantau dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap program-program yang disosialisasikan. Dalam mensosialisasikan program kerja Pemerintahan Desa, Kepala Desa mengundang Ketua-Ketua RT, Anggota BPD, Tokoh-tokoh masyarakat, dan Tokoh-tokoh pemuda, untuk

menjelaskan atau mempresentasikan kepada undangan tentang tujuan maupun sasaran program kemudian setelah itu direalisasikan ke lapangan. Kesepakatan yang diambil dalam pertemuan merupakan kesepakatan bersama, yang bertujuan agar masyarakat dapat menerima, berpartisipasi serta membantu kepala desa dalam merealisasikan program kerja pemerintahan.

Kepala Desa sebagai mediator dalam pantauan peneliti yang terlihat dan nampak dalam aktivitasnya, Kepala Desa cukup meyakinkan dalam proses pembangunan. Dimana setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, Kepala Desa cukup antusias dalam menyelenggarakannya. Misalnya kegiatan syukuran, Kepala Desa selalu aktif dan partisipatif dalam proses berlangsungnya kegiatan tersebut. Setiap persoalan yang terjadi dalam desa pun kepala desa senantiasa ada untuk menyelesaikan, pandangan peneliti bahwa hal ini tentu sangat tidak mudah jika setiap tanggung jawab dan kesadaran pemimpin desa ini benar tidak dilaksanakan untuk itu bahwa Kepala Desa Sajau Hilir telah melaksanakan tugas dengan baik.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sajau Hilir

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sajau Hilir dalam masa jabatan yang ada tentu saja mengalami berbagai faktor baik yang mendukung diantaranya yaitu:

- 1) Adanya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan pembangunan dalam memfasilitasi pembangunan masyarakat yang ada antar Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa seperti fasilitas yang memadai seperti kendaraan dinas, kantor Kepala desa yang

dilengkapi dengan fasilitas elektronik, pemberian bantuan dana penunjang administrasi pemerintahan desa tahun anggaran. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sajau Hilir sangat besar, dimana anggaran dana yang diperoleh desa untuk pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur yaitu jalan, jembatan kentor kepala desa dan sarana-prasarana lainnya berasal dari Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai kantor pusat pemerintah wilayah kabupaten dapat berjalan dengan baik, fasilitas Kantor desa yang ada juga memberikan kesempatan pelayanan Kepala Desa untuk memproses urusan masyarakat dalam desa sehingga dapat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur sangat positif ada pun gedung balai desa yang berdiri megah juga sangat membantu dalam pelaksanaan rapat-rapat desa, balai desa ini juga dapat digunakan gedung serba guna dapat dimanfaatkan masyarakat tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan pesta rakyat, dan digunakan sebagai gedung olahraga yang terbuka untuk umum seluruh masyarakat sekitar ini juga menjadi daya tarik tersendiri Desa Sajau Hilir yaitu gedung serbaguna ini.

- 2) Adanya kerja sama yang saling mendukung dari bawahan kepada kepala desa dengan bersikap loyal terhadap otoritas kepala desa dengan penghargaan kepercayaan menangani setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat dan mewakili penyampaian aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa kepada pemerintah daerah. Selain itu yang jadi faktor pendukung karena jarak antara staf desa dengan masyarakat desa serta hubungan kekeluargaan yang tidak jauh dalam satu lokasi serta adat istiadat

yang sama sehingga memudahkan untuk bekerja sama dalam melaksanakan program kerja.

Kami sebagai tenaga kerja yang ada di kontor Desa Sajau Hilir selalu berkomitmen untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kami, selain itu kami juga bekerja sebagai satu tim yang saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik, enta dengan Kepala Desa, staf yang lainnya dan terutama dengan masyarakat pada umumnya.

- 3) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan Desa Sajau Hilir berupa kehadiran masyarakat pada saat menyusun rencana program berlangsung serta kegiatan desa lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat mendukung dan membantu untuk merealisasikan program kerja yang disusun oleh pemerintah desa. Bentuk partisipasi swadaya masyarakat berupa sumbangan saran dan pendapat dalam pembangunan, yang terpentingnya yaitu kehadiran masyarakat dalam mengikuti kegiatan gotong-royang perbaikan jalan, perbaikan darmaga, dan perbaikan jembatan.

Ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sajau Hilir dalam masa jabatan yang ada tentu ada penghambat-penghambat yang senantiasa dihadapi oleh Kepala Desa Sajau Hilir dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

- 1) Desa Sajau Hilir pada awalnya tidak banyak melakukan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan keterbatasan pada kemampuan keuangan desa yang dimiliki. Untuk anggaran keuangan yang

diperoleh desa masih terbatas untuk melakukan kegiatan pembangunan, hanya untuk kegiatan oprasional desa kemampuan anggaran digunakan. Sumber dana sebagai faktor yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Kondisi yang dialami oleh Desa Sajau Hilir menyebabkan pembangunan yang ada mengalami keterbatasan, yang seharusnya pembangunan bisa mencapai maksimal menjadi terbatas.

Undang-undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya undang-undang tersebut Pemerintah Desa mesti mencari terobosan agar mendapatkan anggaran tambahan untuk meningkatkan pembangunan fisik dan begitu pula dengan pembangunan non fisik yang ada di desa.

- 2) Secara teori tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Demikian halnya dengan aparatur Desa Sajau Hilir tingkat pendidikan kebanyakan masih rendah. Tingkat pendidikan Aparatur Pemerintah Desa memiliki yang relatif masih rendah dan mempengaruhi kinerja dari aparatur pemerintah desa itu sendiri dalam melaksanakan serta meningkatkan pembangunan. Kemampuan aparatur

dalam penggunaan dan pengopersian alat-alat elektronik sangat kurang sehingga untuk memberikan tugas yang bersifat administratif kepada bawahan akan mendapat suatu kesulitan sehingga segala urusan penting hanya berharap pada sekretaris desa saja.

- 3) Keterlibatan swadaya masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagian masyarakat yang sama sekali tidak mau terlibat dalam kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan, padahal pembangunan tersebut juga dimanfaatkan mereka. Kesadaran masyarakat yang tidak mau terlibat dalam kegiatan pembangunan masih kurang sehingga berdampak kepada masyarakat lainnya yang tidak termotivasi karena terpengaruh dengan masyarakat yang tidak mau ambil bagian dalam proses pembangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang didasarkan pada rumusan masalah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa dalam hal ini peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sajau Hilir sebagai motivator yaitu memotivasi warga untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Peran kepala desa sebagai mobilisator yaitu menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta memberikan arahan untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan gotong-royong. Sebagai fasilitator berupaya untuk memfasilitasi masyarakat dengan mengadakan pembangunan berupa pembuatan jalan desa, irigasi, jembatan, air bersih, balai pertemuan dan sarana olahraga. Pembangunan digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan. Sebagai mediator selalu berusaha membantu dan menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat, dan memberikan solusi baik, serta kepala Desa menampung aspirasi masyarakat, menjalankan dengan melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan desa.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sajau Hilir yaitu adanya peran pemerintah tingkat kabupaten yang memberikan dana

bantuan pembangunan desa, dan adanya kerja sama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat, serta partisipasi masyarakat desa yang turut campur dalam pelaksanaan pembangunan desa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sajau Hilir yaitu anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah masih terbatas untuk melaksanakan pembangunan, tingkat pendidikan Aparatur Pemerintah Desa relatif rendah sehingga mempengaruhi kinerja dari aparat pemerintah desa itu sendiri, dan masih ada sebagian masyarakat yang sengaja yang tidak mau terlibat dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan pembangunan Desa Sajau Hilir sebagai berikut:

1. Kepala desa sebagai pimpinan desa harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mampu mengayomi masyarakat serta mau menerima saran ataupun kritikan dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
2. Untuk Kepala Desa Sajau Hilir, agar meningkatkan koordinasi antar warga secara menerus supaya terjalin suatu hubungan yang erat antara pimpinan dengan masyarakat dan staf kantor.
3. Untuk masyarakat diharapkan mendukung dan dapat terlibat dengan kebijakan serta arahan Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Kelautandan Kewilayahan*. Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Anggi Setiawan 2013. *Peran Kepala Desa Terhadap Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Bumi Rapak Kabupaten Kutai Timur*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Hendra Mondong. 2015. *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*.
- Irawan dan M. Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Khairuddin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, Averroes Press, Malang.
- Khairudin, SS. 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan aspek: sosiologi, ekonomi dan perencanaan*. Yogyakarta: Penerbit Liberti.
- Khayrul Fiker, Priyatno Harsasto, Rina Martini. 2013. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang*.
- Kozier, Barbara, 2006. *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Marbun, 2008. *Proses Pembangunan Desa Menyangsang Tahun 2000*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kaulitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kaulitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Sahidu, Arifudin. 2002. *Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Disertasi. Pascasarjana, IPB.
- Siagian, Sondang. P. 2000. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang. P. 2006. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: BumiAksara.
- Soerjono, Soekanto, 2009. *Sosioiogi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Peneitian Pendidikan*. Jakarta: BumiAksara.
- Sumardjo dan Saharudin, 2003. *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Faperta IPB
- Tjokromidjojo, Bintoro. 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widjaja, AW. 2006. *Pemerinlahundan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, AW. 2012. *Pemerinlahundan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber Internet:

- [http:// Arianto Samier Irhash sobat baru. blogspot. com/2010/12/pengertian-kepala-desa.html](http://AriantoSamierIrhashsobatbaru.blogspot.com/2010/12/pengertian-kepala-desa.html). Diakses 29/3/2020.
- <https://tutyirawaty.wordpress.com/2009/05/26/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan/> Diakses 29/3/2020.
- Satria Eka Tri Laksana. [blogspot.com/2012](https://satriatekatri.blogspot.com/2012)).

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden :

Jabatan Responden :

Waktu Kegiatan Wawancara :

1. Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan

a. Peran Pemerintah desa sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan

1. Menurut Bapa/ibu, bagaimana peran kepala desa sebagai motivator dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pembangunan?
2. Selama ini apakah kepala desa telah memberikan contoh yang positif untuk diikuti masyarakat desa dan bawahannya?
3. Bagaimanakah pemerintah desa memberikan motivasi kepada bawahan/masyarakat dalam melaksanakan pembangunan?
4. Apakah dengan motivasi yang diberikan oleh kepala desa dapat memotivasi bawahannya/ masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan?
5. Apakah setiap pertemuan desa mengikutsertakan masyarakat agar menyampaikan aspirasinya?
6. Bagaimana bentuk motivasi yang diberikan kepala desa kepada masyarakat Desa Sajau Hilir?

b. Peran kepala desa sebagai mobilisator dalam pembangunan

1. Menurut pendapat Bapak/ibu, bagaimana peran kepala desa sebagai mobilisator?
2. Apakah selama ini kepala desa selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan?
3. Apakah kepala desa pernah mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong atau, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya?

c. Peranan Pemerintah desa sebagai mediator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

1. Bagaimanaa caranya pemerintah desaa memediasikan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di desa Sajau Hilir?
2. Bagaimana bentuk peranan pemerintah desa sebagai mediator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan?
3. Kapan dan dimana pemerintah memediasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan?

d. Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam pembangunan

1. Apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam memfasilitasi pelaksanaan pembangunan?
2. Menurut Bapak/ibu bagaimana peran pmerintah desa sebagai fasilitator dalam rangka pembangunan di desa Sajau Hilir ?
3. Menurut Bapak/ibu, apakah peranan kepala desa dalam memfasilitasi dapat membantu membangun desa anda, jelaskan?
4. Bagaimana kepala desa dapat memfasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pembangunan?
5. Apa yang menjadi sasaran utama dari tindakan memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa?
6. Apakah masyarakat merasakan fasilitas yang disediakan oleh kepala desa dalam mewujudkan pembangunan desa, jelaskan?
7. Sebagai fasilitator, apa yang menjadi kendala kepala desa dalam memfasilitasi terwujudnya pembangunan di Desa Sajau Hilir?

2. Faktor yang mempengaruhi Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan

- a. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi pemerintah desa desa dalam meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan, jelaskan?
- b. Apakah peran pemerintah Kabupaten menjadi pendukung dalam pelaksanaan pembangunan desa, jelaskan?
- c. Bagaimanakah partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa?

- d. Apa yang menjadi kendala terbesar dalam proses pelaksanaan pembangunan?
- e. Mengapa kendala tersebut dapat terjadi?
- f. Apakah kurangnya perhatian pemerintah daerah dapat menjadi kendala dalam pembangunan desa, jelaskan?.
- g. Apakah kurangnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan, jelaskan?

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

- 1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan?
- 2. Bagaimana bentuk partisipasi dalam memelihara dan memanfaatkan pembangunan?
- 3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan?

Dokumentsi Kegiatan Penelitian



Hasil Kegiatan Wawancara Bersama Ketua Bpd Desa Sajau Hilir



Kegiatan Wawancara Bersama Pak Masse Sekdes Desa Sajau Hilir



Kegiatan Wawancara Bersama Ketua Rt5 Dan Salah Satu Tokoh Masyarakat



Bersama Anggota Bpd, Ketua Rt2 , Dan Tokoh Masyarakat



Bersama Salah Satu Tokoh Pemuda Desa Sajau Hilir



Kegiatan wawancara bersama.....